

EVALUASI KEBIJAKAN SUBSIDI BAHAN BAKAR FOSIL: DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DAN EKONOMI

Daffa Antarsyah¹, Raizky Rienaldy Pramasha², Ravid Ariq Arkan³, Ahmad Aflah Putra⁴, M.Andi Samudra⁵

daffauye74@gmail.com¹, raizkyrienaldypramasha@radenintan.ac.id²,
nadzwaafauza@gmail.com³, ahmadaflahputra24@gmail.com⁴, samudraa985@gmail.com⁵

UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Subsidi pemerintah memainkan peran penting dalam kesejahteraan masyarakat. Bukti nyata dari komitmen pemerintah untuk mensejahterakan warganya. Kesejahteraan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga faktor non-ekonomi seperti pendidikan, kejahatan, kesehatan, dan politik. Pemerintah fokus pada ekonomi karena kesehatan ekonomi yang kuat mendukung sektor-sektor non-ekonomi. Subsidi adalah mekanisme distribusi anggaran melalui perusahaan atau lembaga yang menyediakan barang dan jasa penting. Hal ini memungkinkan masyarakat mengakses barang dan jasa tersebut dengan harga terjangkau.

Kata Kunci: Subsidi, Bahan Bakar Fosil, Lingkungan, Ekonomi.

ABSTRACT

Government subsidies are an important network in a country. Which acts as real evidence of the government's responsibility in order to improve the welfare of its people. The impact of welfare is not solely While welfare programs have significant economic implications, their effects also extend to social, psychological, and political dimensions. ecause a stable economic condition can guarantee the health of other non-economic conditions. For example, education, crime, health and even the political climate. Issues related to these sectors are inseparable from the existence of a country's economic conditions. Subsidies are budget allocations that are channeled through companies/institutions that produce, sell goods and services, which fulfill the needs of many people in such a way that the selling price can be reached by the community.

Keywords: Subsidies, Fossil Fuels, Environment, Economy.

PENDAHULUAN

Pemerintah menyediakan subsidi sebagai bukti komitmen mereka untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik.

Kemampuan individu yang bervariasi dalam memenuhi kebutuhan dapat menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan. Subsidi bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan akses terhadap barang dan jasa.

Namun, subsidi juga menjadi sasaran kritik, terutama terkait kepentingan politik dan ketepatan penerima. Subsidi pemerintah dipengaruhi oleh faktor politik, seperti janji kampanye atau upaya menjaga harga bahan bakar tetap rendah.

Subsidi adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengurangi harga barang dan jasa penting agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Subsidi dibagi menjadi dua kategori: subsidi energi (bahan bakar, gas, listrik) dan subsidi nonenergi (pangan, pupuk, pendidikan). Diskusi tentang subsidi dalam kebijakan pemerintah Indonesia sering kali menjadi topik yang diperdebatkan, baik saat disusun maupun dibahas. Perdebatan serupa juga terjadi di negara lain yang masih memberlakukan subsidi. Bahkan, kebijakan subsidi sering kali memicu ketegangan politik, terutama karena dampaknya yang luas pada kehidupan banyak warga. Umumnya, kontroversi muncul ketika ada usulan untuk mengurangi atau menghapus subsidi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai metode analisisnya. Metode ini melibatkan proses sistematis, jelas, dan dapat diulang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan penelitian dan pemikiran yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan praktisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan subsidi sebagai bantuan berupa uang atau barang yang diberikan kepada organisasi atau individu (biasanya dari pemerintah). Menurut para ahli ekonomi, Subsidi merupakan bantuan dana yang diberikan pemerintah kepada bisnis atau keluarga untuk meningkatkan produksi atau konsumsi barang/jasa tertentu dengan cara meningkatkan jumlah atau menurunkan harga.

Subsidi juga dapat diartikan sebagai bentuk pengeluaran pemerintah yang berupa pajak negatif, sehingga menambah pendapatan penerima subsidi atau meningkatkan pendapatan riil saat membeli barang bersubsidi dengan harga lebih rendah. Subsidi dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk: tunai (cash transfer) dan barang (in kind subsidy). Menurut pemerintah Indonesia, subsidi adalah alokasi dana yang disalurkan melalui produsen atau lembaga yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, sehingga harga jualnya terjangkau. Subsidi energi (BBM, listrik, dll.) dan nonenergi (pangan, pupuk, dll.) merupakan contoh utama belanja subsidi.

Pada dasarnya, subsidi adalah upaya pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, subsidi dapat dipahami sebagai bantuan keuangan pemerintah yang diberikan kepada produsen dan konsumen untuk barang atau jasa tertentu.

Subsidi pertama kali diterapkan di Inggris pada abad ke-10-11. Landasan penerapan subsidi meliputi bantuan bermanfaat kepada masyarakat, pengurangan beban, dan fokus pada keuntungan bagi masyarakat. Sumber dana subsidi berasal dari pajak.

Teori Program Subsidi Pemerintah

Pada abad ke-10 hingga ke-11 di Inggris, ide subsidi mulai muncul pada masa pemerintahan Raja Charles II. Konsep ini kemudian berkembang secara signifikan pada abad ke-20. subsidi mulai berkembang pesat. Sejak saat itu, program subsidi telah menjadi alat umum dalam anggaran pemerintah.

Prinsip Subsidi

Bantuan dari pemerintah kepada kelompok atau individu, biasanya berupa pembayaran tunai atau potongan pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Peran Subsidi dalam Pemerintahan

Subsidi menjadi alat untuk mendistribusikan pendapatan dalam masyarakat. Di Indonesia, beberapa jenis subsidi antara lain: Subsidi Penyesuaian Harga Membantu masyarakat dengan mengurangi harga di bawah harga pasar, mendorong konsumsi, Subsidi Tunai Langsung Memberikan uang tunai kepada masyarakat, membiarkan mereka menentukan alokasinya sendiri.

Dampak Subsidi

Subsidi hanya diterapkan jika manfaatnya lebih besar dari biaya. Namun, subsidi dapat menyebabkan pajak yang lebih tinggi atau kenaikan harga barang.

Subsidi di Indonesia

Subsidi yang paling menonjol di Indonesia adalah subsidi harga BBM. Pemerintah berupaya meredistribusikan pendapatan melalui subsidi ini karena BBM merupakan komoditas penting. Namun, kebijakan ini sering dikritik karena dapat memicu kesenjangan dan ketidakadilan.

Manfaat Subsidi

Subsidi seringkali diberikan untuk Barang dan jasa yang memberikan nilai dan manfaat yang positif bagi komunitas. secara keseluruhan, yang dikenal sebagai eksternalitas positif. Tujuannya adalah untuk mendorong produksi yang lebih tinggi dan alokasi sumber daya yang lebih banyak ke bidang-bidang ini, seperti pendidikan dan teknologi canggih.

Manfaat implementasi subsidi meliputi: Peningkatan kondisi ekonomi secara keseluruhan, Dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan mereka, Perlindungan usaha dari kebangkrutan.

Dampak Negatif dan Subsidi

Meskipun subsidi bertujuan baik, ada beberapa dampak negatif yang harus dipertimbangkan Pemberian subsidi menyebabkan harga komoditas dan layanan menjadi lebih rendah dari nilai pasar, sehingga menyebabkan pemborosan sumber daya, sehingga konsumen cenderung mengonsumsi berlebihan. Hal ini menyebabkan pemborosan sumber daya dalam memproduksi barang bersubsidi.

Distorsi Harga Subsidi menghasilkan harga yang tidak akurat, yang dapat menyesatkan konsumen dan produsen.

Program Populis yang Tidak Transparan dan Tidak Tepat Sasaran Subsidi yang tidak jelas dan tidak ditargetkan dengan baik dapat menciptakan distorsi ekonomi dan menguntungkan kelompok yang tidak berhak.

Inefisiensi Subsidi dapat mendorong produsen untuk beroperasi secara tidak efisien, karena mereka tidak perlu bersaing di pasar secara adil.

Gangguan Pasar dan Biaya Ekonomi Subsidi dapat merusak pasar dan menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi.

Produksi yang Tidak Kompetitif Subsidi dapat melindungi produsen yang tidak efisien, merugikan pesaing swasta.

Konsep Subsidi Dalam APBN

Pemerintah memberikan bantuan keuangan dalam bentuk subsidi kepada konsumen atau produsen untuk mengurangi biaya barang dan layanan yang mereka beli atau hasilkan, sehingga masyarakat bisa membeli lebih banyak. Sebagai alat kebijakan, subsidi bertujuan mendistribusikan kembali pendapatan dan menstabilkan harga barang pokok. Pemerintah membayar subsidi untuk membuat harga barang dan jasa lebih terjangkau, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi diberikan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga, terutama untuk barang pokok. Pemerintah berusaha menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, terutama kepada masyarakat miskin. Namun, Ketika membuat keputusan, penting untuk memperhitungkan keterbatasan keuangan negara dan menggunakan sumber daya secara efektif.

Arah Kebijakan Subsidi

Untuk meningkatkan efisiensi subsidi dan memastikan penggunaan dana publik yang optimal, pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi tahun 2016 yang meliputi:

- Menstabilkan harga
- Membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan kehidupan layak bagi semua.

- Meningkatkan efisiensi produksi untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.
- Meningkatkan daya saing produksi dan akses modal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah

Besaran anggaran subsidi dalam APBN 2016 adalah Rp182.571,1 miliar, mengalami penurunan Rp29.533,3 miliar dari anggaran sebelumnya pada tahun 2015.

Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk subsidi energi (Rp102.080,2 miliar), termasuk subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan LGV (Rp63.692,8 miliar) serta subsidi listrik (Rp38.387,4 miliar).

Selain subsidi energi, pemerintah juga mengalokasikan subsidi nonenergi sebesar Rp80,49 triliun yang meliputi:

- Subsidi pangan: Rp20,99 triliun
- Subsidi pupuk: Rp30,06 triliun
- Subsidi benih: Rp1,02 triliun
- Subsidi PSO (Public Service Obligation): Rp3,75 triliun
- Subsidi bunga kredit program: Rp16,47 triliun
- Subsidi pajak yang ditanggung pemerintah: Rp8,18 triliun

Jenis Subsidi

Pemerintah membagi belanja subsidi dalam APBN menjadi dua jenis, yaitu subsidi energi dan nonenergi.

Subsidi energi merupakan dana yang diberikan kepada badan usaha yang menyalurkan bahan bakar (BBM, BBN), LPG 3 kg, dan LGV, serta listrik. Tujuannya adalah agar harga jual barang-barang tersebut tetap terjangkau bagi masyarakat.

Dampak dan konsekuensi dari pemberian dan penghentian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

BBM dan gas, sebagai sumber energi penting, memiliki pengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Fluktuasi harga bahan bakar secara langsung mempengaruhi perekonomian, termasuk ketersediaan kebutuhan pokok dan kondisi kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menerapkan subsidi BBM sebagai solusi. Sejak bertahun-tahun, kebijakan subsidi BBM telah mengalami perubahan pada setiap pemerintahan. Variasi subsidi ini berkisar dari 50% pada masa Presiden Abd. Wahid, 75% pada masa Presiden Megawati, hingga berbasis kuota pada masa Presiden SBY.

Subsidi BBM merupakan bagian dari kebijakan energi nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memperkuat ketahanan nasional. Undang-Undang Energi No. 30 Tahun 2007 menggariskan fokus kebijakan pada aspek penyediaan dan permintaan.

Untuk memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah bertanggung jawab atas eksplorasi, produksi, dan konservasi energi. Permintaan bahan bakar dikurangi melalui diversifikasi dan konservasi. Kebijakan mengenai harga, yang menghubungkan antara ketersediaan dan kebutuhan, melibatkan dukungan finansial langsung atau pengaturan harga pasar yang sesuai.

Pemerintah mengalokasikan subsidi untuk BBM dan gas, dengan porsi terbesar untuk BBM. Subsidi gas hanya diberikan untuk gas LPG 3 kg.

Subsidi BBM terbagi berdasarkan jenis BBM: Sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialokasikan untuk tiga jenis BBM: solar (35%), premium (61%), dan minyak tanah (4%). Distribusi subsidi BBM berdasarkan pengguna meliputi:

- Transportasi darat: 97,33%
- Transportasi air: 0,12%
- Usaha kecil: 0,2%

- Perikanan: 0,11%
- Rumah tangga: 2,25%

Premium menerima subsidi terbesar, terutama digunakan oleh mobil pribadi (53%), motor (40%), mobil barang (4%), dan kendaraan umum (3%).

Subsidi BBM diatur dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menyatakan bahwa BBM adalah kebutuhan vital masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.

Namun, subsidi BBM menimbulkan pro-kontra karena mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan. Pemerintah terpaksa mencabut subsidi premium pada 2015 dan memberikan subsidi tetap Rp1000 untuk solar.

Langkah ini sejalan dengan rencana penghapusan bertahap subsidi BBM yang ditetapkan dalam UU No 22/2011. Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatur penggunaan BBM murah untuk memastikan bahwa BBM tersebut hanya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya.

Produksi dan pengambilan minyak terus berkurang. Pemerintah menanggung beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semakin besar, memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Subsidi BBM dianggap tidak merata, karena hanya 25% masyarakat termiskin yang menerima 15% subsidi.

Pemerintah berencana mengalihkan dana subsidi BBM ke infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Perbedaan harga BBM antara Indonesia dan negara tetangga mendorong penyelundupan dan penimbunan BBM.

Tujuan Kebijakan

Penurunan harga BBM akan menghasilkan dana tambahan Rp. 120 triliun yang dialokasikan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dialihkan ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pertanian (memberikan benih dan pestisida) dan perikanan (menyediakan solar). Selain itu, dana subsidi juga akan difokuskan pada program kesejahteraan untuk masyarakat miskin (seperti Bantuan Langsung Tunai dan Raskin) serta investasi dalam pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan industri manufaktur, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga terdidik. Pengalihan subsidi BBM untuk Investasi di sektor krusial seperti infrastruktur (irigasi, jalan), layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan pekerja agraris lebih berdampak positif bagi warga kurang mampu. Subsidi yang difokuskan pada layanan dasar dapat memperbaiki kehidupan mereka. Subsidi pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia, daya saing, dan produktivitas.

Subsidi energi merupakan instrumen penting dalam kebijakan ekonomi, yang bertujuan mendukung sektor energi dan masyarakat. Subsidi dapat diberikan dalam bentuk pengurangan pajak, harga bersubsidi, atau dukungan langsung kepada produsen energi.

Dampak positif subsidi energi meliputi:

- Akses energi yang terjangkau
- Pendorong pertumbuhan ekonomi
- Stabilitas harga energi

Dampak Negatif Sumber Energi,

- Beban anggaran pemerintah
- Distorsi pasar

Dampak negatif lingkungan dari subsidi energi meliputi,

- Ketergantungan pada sumber daya fosil
- Kerusakan ekosistem

Evaluasi kebijakan subsidi energi harus mempertimbangkan analisis biaya-manfaat dan potensi alternatif kebijakan. Reformasi kebijakan dapat diperlukan jika dampak negatif lebih besar dari manfaatnya. Transparansi dan akuntabilitas penting dalam kebijakan subsidi energi.

KESIMPULAN

Penurunan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan menciptakan dana tambahan sebesar Rp120 triliun, yang akan dialokasikan untuk kesejahteraan. Dana tersebut akan dialihkan ke usaha produktif, Bantuan keuangan akan diberikan kepada petani (misalnya subsidi benih dan pestisida) dan nelayan (misalnya bahan bakar solar).

Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk program kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, seperti bantuan tunai langsung (BLT), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap tenaga terdidik.

Pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti irigasi, jalan raya, kesehatan, pendidikan, dan pertanian, akan lebih menguntungkan masyarakat miskin. Dana ini akan digunakan untuk menyediakan layanan dasar, yang berdampak positif pada pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allifah, S., Syaikat, Y., & Wijayanti, P. (2022). Dampak Tenaga Air dan Bahan Bakar Fosil terhadap Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 9(3), 102-112.
- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356.
- Rusmina, C., & Yana, S. (2024). Kontribusi Energi Hijau terhadap Bio-Ekonomi: Analisis Aspek Finansial dan Lingkungan. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(2).
- Siringo-ringo, M. (2024). Kebijakan Energi dan Dampak Lingkungan: Menuju Model Berkelanjutan. *Circle Archive*, 1(5).